

ANTARA NEWS BALI

Mencerahkan, Memberdayakan, Mengedukasi, Nasionalisme



**GUBERNUR BALI: TEMBAK MATI
PENGEDAR NARKOBA
Hal.3**



**DISKES BADUNG TARGETKAN 148.644
ORANG IMUNISASI JE
Hal.11**



6 | MAKNAI NYEPI DENGAN BIJAKSANA

Sri Mulyani Dorong Pengelolaan Investasi SDM Tepat Sasaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pengelolaan investasi di bidang sumber daya manusia agar tepat sasaran sehingga mampu menjawab tantangan dalam upaya memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Ini merupakan tantangan, tidak hanya menyediakan sekolah tetapi bagaimana mengelola sekolah, menciptakan suasana belajar, kualitas guru dan kurikulum,” katanya usai menyampaikan pidato kunci dalam seminar internasional terkait SDM di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut Sri Mulyani, tiga isu yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia di antaranya pendidikan, kesehatan dan jaring sosial pengamanan.

Kepada para peserta seminar yang merupakan bagian “voyage to Indonesia” menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018, Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran paling

besar untuk pendidikan mencapai 20 persen dan kesehatan sebesar lima persen dari total APBN.

Untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lanjut dia, anggaran kesehatan bahkan bisa lebih besar mencapai lebih dari 10 persen.

Namun persoalan pembangunan SDM bukan hanya semata berapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi yang terpenting menurut Sri Mulyani terkait optimalisasi pemanfaatan dana tersebut.

Pemanfaatan anggaran tersebut dapat diimplementasikan dalam menciptakan program, eksekusi hingga menciptakan perbaikan untuk produktivitas sumber daya manusia.

Dari sisi pendidikan, kurikulum yang komprehensif, adaptif dan dinamis dapat menciptakan SDM yang inovatif dan mampu menghadapi era digital saat ini serta untuk pendidikan vokasi juga perlu dikembangkan untuk SDM terampil.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika (kanan) di sela seminar internasional tentang sumber daya manusia penggerak perekonomian di Kuta, Bali, Kamis (1/3). (Antara Bali/Dewa Wiguna/2018)

Sri Mulyani menyebutkan pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan pemberian insentif bagi perusahaan yang memberikan pelatihan keahlian yang bermanfaat bagi calon pekerja ketika mereka duduk di bangku sekolah.

“Skema sedang dibahas Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian bersama kami untuk bisa membangun skema insentif

sehingga tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar di perusahaan,” ucapnya.

Dari sisi kesehatan, kecukupan pemenuhan nutrisi merupakan hal yang penting menjadi perhatian pemerintah.

Selain itu melalui jaring pengamanan sosial yang dikelola baik, masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan dan mendorong kesetaraan gender(ant)

Gubernur Minta BNN Optimalkan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima Kepala BNN Heru Winarko, di Denpasar. (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali/2018)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Badan Narkotika Nasional mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan mengintensifkan penindakan.

“Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara masif dan melibatkan peran segenap unsur masyarakat termasuk di dalam-

nya peran lembaga swadaya masyarakat serta partisipasi dari CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan),” kata Pastika saat menerima Kepala BNN Heru Winarko, di Denpasar, Jumat.

Di samping itu, tambah dia, upaya pencegahan, rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba perlu terus diintensifkan.

“Jika memungkinkan di Bali dibangun pusat rehabilitasi.

Saya juga sudah bertemu dengan Universitas Shanghai China untuk pengembangan pengobatan tradisional bagi pengguna narkoba. Penindakan tetap jalan, pencegahan dan rehabilitasi juga harus jalan terus,” ujar Pastika.

Gubernur Bali yang didampingi Penjabat Sekda Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Ardha dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Dewa Putu Mantera juga meminta BNN terus meningkatkan kinerjanya, mengingat tantangan ke depan yang semakin kompleks dan sulit.

“Sekarang sudah beredar hampir 71 jenis narkoba, tantangan ke depan semakin sulit dan kompleks. Untuk itu, kita harus terus percanggih sistem dan tingkatkan sinergi yang ada. Kita selamatkan generasi muda dari bahaya narkoba,” ucap mantan Kapolda Bali itu.

Sementara itu, Kepala Badan

Narkotika Nasional Heru Winarko mengatakan pihaknya terus meningkatkan kerja sama dengan semua pihak khususnya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan dari penyalahgunaan narkoba.

Di samping membangun sistem yang canggih, upaya penyuluhan terkait bahaya narkoba ke tengah masyarakat serta keterlibatan desa adat dalam upaya pencegahan narkoba juga terus diintensifkan.

“Sistem di lembaga kemasyarakatan rencananya kami perbaiki sehingga tidak ada lagi kesan bahwa lapas sebagai tempat perdagangan narkoba,” ucapnya.

Pihaknya juga menyambut baik keinginan Pemprov Bali untuk membangun pusat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba, dan BNN siap mendukung upaya tersebut. (Ant)

Gubernur Bali: Tembak Mati Pengedar Narkoba



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menghadiri rapat kerja bersama DPRD Provinsi Bali, di Denpasar. *Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali*

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan para pengedar narkoba bisa ditembak mati sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perdagangan barang haram itu.

“Orang (pengedar narkoba) sudah tidak takut lagi dengan hukuman, kecuali mungkin ditembak mati,” kata Pastika di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, perdagangan narkoba sejauh ini masih dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan oleh para pelakunya karena bisa mendapat keuntungan yang besar, barangnya sangat laku, harganya mahal dan modalnya pun sedikit.

Karena itu, ujar Pastika, hal yang mungkin dilakukan untuk meminimalkan peredarannya

adalah dengan membuat narkoba menjadi barang yang tidak laku.

Caranya, kata dia, adalah dengan mengajak keluarga maupun orang-orang terdekat agar menjauhi dan tidak mengonsumsi narkoba.

Di sisi lain, mantan Kepala Pelaksana Harian BNN ini pun menyatakan salut dengan kinerja kepolisian yang berhasil menangkap tiga tersangka pada Selasa (20/3) karena terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat dua kilogram lebih (2.030 gram).

“Kenapa sampai 2 kilogram, berarti konsumsinya banyak di Bali. Razia juga yang lainnya,” ujar Pastika.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Bali, Kombes (Pol) Hengky Widjaja mengatakan, penangkapan tiga tersangka ini bermula saat menangkap dua laki laki bernama ENJ dan AP di depan Pos 11 pintu masuk Bali, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Dari hasil pengeledahan, petugas mendapati satu buah ransel berisi dua buah kantong plastik yang di dalamnya berisi kristal bening dengan masing-masing beratnya 1.015 gram dan 1.015 gram.

Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah kos ENJ di Jalan Nuansa Indah Utara satu berhasil mengamankan satu buah alat hisap sabu (bong) dan satu buah buku catatan jual beli sabu-sabu.

Petugas tidak begitu saja percaya dengan keterangan tersangka dan mengembangkan kasus ini hingga berhasil menangkap tersangka NY di rumahnya di Jalan By Pass Ngurah Rai, Desa Suwung Kauh, Denpasar Selatan.

Dari hasil pengeledahan di rumah NY, petugas hanya mendapatkan barang bukti tiga unit telepon genggam dan sejumlah buku tabungan dan uang tunai yang diduga untuk melakukan transaksi bisnis terlarang itu. (Ant)

Konsultan Bank Dunia Kembali Survei Bandara Buleleng

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan tim konsultan yang ditunjuk oleh Bank Dunia menyetujui untuk kembali mengadakan survei terkait rencana pembangunan bandar udara baru di kawasan utara Pulau Dewata, yakni Buleleng.

“Saya jelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi dan mereka setuju untuk datang lagi ke Bali,” kata Pastika setelah menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, tentu saja survei yang akan dilakukan oleh Konsultan Bank Dunia itu harus lebih komprehensif dengan melibatkan jajaran pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, maupun berbagai lembaga terkait.

Orang nomor satu di Bali itu berpandangan survei yang dilakukan sebelumnya oleh mereka itu tidak lengkap, yang salah satu hasilnya menyebutkan

bahwa pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng itu tidak layak.

“Mereka melakukan studi tanpa melibatkan provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari Universitas Udayana yang memang dilibatkan hanya satu orang, itupun atas nama per-orangan dan bukan atas nama pemerintah,” ucapnya.

Demikian juga perwakilan Pemprov Bali yang diundang hadir dari Dishub dan Bappeda, tetapi pejabat tersebut bukan orang yang berwenang menentukan kebijakan apapun, serta memang mereka tidak diberi kesempatan berbicara.

“Belum lagi kalau bicara dari perizinan, kalau melakukan penelitian harus ada izin dari provinsi, kalau scope-nya antarkabupaten dan sebagainya. Apalagi ini adalah proyek yang sangat strategis, seharusnya melibatkan kita, minta izin dari kita dulu,



Gubernur Bali Made Mangku Pastika setelah menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar. *(Antaraneews Bali/Ni Luh Rhisma)*

mendapat penjelasan dulu dari kita dan kalau perlu melibatkan kita,” ujarnya.

Selain itu, Pastika juga menyesalkan karena sebelumnya yang dipakai data sekunder oleh tim survei Konsultan Bank Dunia itu adalah data tahun 2015, yang kondisinya sudah banyak terjadi

perubahan.

“Saya katakan masalah airport ini kita sudah mulai memimpikannya puluhan tahun lalu karena melihat ketimpangan yang sangat mencolok, baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya,” katanya (Ant)

Dampak Ekonomi Pertemuan IMF untuk Bali Diteliti



Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti saat menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar. (AntaraneWS Bali via Humas Pemprov Bali)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan melakukan penelitian dan analisis ekonomi terkait dampak pelaksanaan pertemuan tahunan IMF dan World Bank pada pertengahan Oktober 2018 terhadap Bali.

“Dari hasil survei ini, nantinya diharapkan akan menjadi `feedback` dan data strategis kondisi

sesungguhnya yang terjadi di lapangan,” kata Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti saat menemui Gubernur Bali, di Denpasar, Rabu.

Pihaknya selaku koordinator bersama tim akan melaksanakan studi tersebut dengan tiga tahap. Tahap pertama pre-event analysis, tahap kedua survei terhadap 1.000

responden dan 500 UMKM yang ada di Bali, dan tahap selanjutnya adalah post-event guna mengetahui dampak untuk Bali ke depan terutama bidang pariwisata.

Amalia menambahkan, dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks (indeks pertumbuhan ekonomi inklusif), Bali menduduki peringkat nomor dua setelah DKI. Ini menyatakan Bali cukup inklusif dibandingkan provinsi lain dan (bisa) menjadi contoh termasuk kiat-kiatnya,” ucap dia.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sejak awal kepemimpinannya berorientasi inklusif. “Semua program kita, baik RPJMD pertama dan kedua semuanya pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment, dan pro-culture,” katanya.

Di Bali, lanjut dia, ada tambahan pro-democracy yaitu dengan disediakannya sarana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) setiap hari Minggu di Lapangan Barat Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Renon Denpasar. PB3AS ini menjamin masyarakat bebas berbicara tentang apa saja dan disampaikan secara umum tanpa melalui birokrasi yang rumit.

Program-program Pemprov Bali semua masuk dalam kategori inklusif, misalnya bidang ekonomi ada program Gerbangsadu Mandara dan Jamkrida serta ratusan BUMDes yang sudah terbentuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Bidang pendidikan ada SMA dan SMK Bali Mandara yang khusus menerima siswa miskin dan lulusannya sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri.

Bidang kesehatan ada RS Mata Bali Mandara dan RSUD Bali Mandara yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan fasilitas berkelas. “Banyak hal-hal menarik yang nanti bisa disurvei. Di Bali (program-program itu) tidak pernah di-launching. Kami hanya kerjakan, setelah di akhir baru kami lakukan evaluasi,” ucapnya. (Ant)

Gubernur Bali : Kurangi Penggunaan Plastik

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari, karena posisi Pulau Dewata sebagai tujuan pariwisata dunia.

“Bali sudah delapan kali berturut-turut menjadi `the best destination in the world`, untuk itu janganlah kita lengah. Jaga terus lingkungan kita, kurangi penggunaan plastik. Kita harus bisa hentikan penggunaan plastik, saya yakin kita bisa kalau kita mau. Mari kita jaga alam Bali bersama-sama,” katanya di Denpasar, Minggu.

Saat berorasi pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) itu, Pastika mengatakan, sampah khususnya sampah plastik harus menjadi perhatian semua pihak, karena sampah plastik sangat sulit terurai sehingga akan merusak lingkungan sekitar.

“Terlebih baru-baru ini ada fenomena tumpukan sampah plastik di lautan yang memberi dampak buruk pada citra pariwisata Bali serta mengganggu kenyamanan para wisatawan,” ujarnya.

Meskipun peristiwa menumpuknya sampah di lautan dan sekitar pantai dapat dikatakan terjadi dalam waktu tertentu saja sebagai akibat dari musim, Pastika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik.

“Kami sangat berharap masyarakat turut berperan nyatadalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” ucap mantan Kapolda Bali itu.

Seluruh komponen masyarakat, baik itu mahasiswa maupun pelaku pariwisata diharapkan bergerak bersama dalam membersihkan lingkungan sekitar dari sampah khususnya sampah plas-



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat berorasi di ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar. (Humas Pemprov Bali)

tik.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Udayana Fauzi Rukito, dalam orasinya mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya untuk memilih Gubernur Bali sesuai dengan hati nurani serta tidak terpecah ataupun berselisih hanya karena beda pilihan.

Ia mengajak para pemilih un-

tuk memahami visi dan misi serta mengetahui betul rekam jejak dari masing-masing calon.

Fauzi berharap pada 27 Juni mendatang masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara dan menyalurkan hak pilih mereka berdasarkan pada hati nurani, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. (Ant)

Pemkot Denpasar Luncurkan Program “Sirekon”



Aplikasi berbasis web “Sistem Rekomendasi Perizinan Online (Sirekon)” ini merupakan terobosan layanan komunikasi yang diluncurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Denpasar bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar. (Foto Humas Pemkot Denpasar)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, memberi kemudahan kepada masyarakat yang akan mengurus perizinan penelitian dengan program “Sistem Rekomendasi Perizinan Online (Sirekon).

Pelaksana Tugas Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Rabu, men-

gatakan dengan program Sirekon memberikan kemudahan para peneliti dalam mengajukan penelitian, karena segala persyaratannya dapat diakses via “online” dan diverifikasi oleh petugas, hingga rekomendasi dapat diambil oleh peneliti dengan sangat mudah.

“Aplikasi berbasis web ini

merupakan terobosan layanan komunikasi yang diluncurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Denpasar bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar,” katanya.

Ia mengatakan masyarakat yang memerlukan surat rekomendasi izin penelitian cukup mengunjungi website : <https://sirekon.denpasarkota.go.id> dan mengikuti prosedural yang telah ditentukan.

Menurut data dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Denpasar, sampai saat ini dilaporkan sudah lebih dari 100 masyarakat yang memanfaatkan situs online tersebut.

Jaya Negara mengatakan dengan adanya Sirekon diharapkan agar mahasiswa dan mahasiswa dengan mudah mengurus izin penelitian di Kota Denpasar.

“Karena sudah berbasis jaringan (online), masyarakat bisa langsung mengurus izin peneli-

tian dengan mudah, karena dalam website tersebut sudah dilengkapi tahapan dan langkah-langkah dalam mengurus izin penelitian,” ucapnya.

Jaya Negara mengatakan zaman yang serba teknologi diharapkan dengan adanya Sirekon bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mencari izin penelitian di Wilayah Kota Denpasar serta program Pemkot Kota Denpasar menuju “Denpasar Smart City” yang berwawasan budaya dapat terealisasi dengan baik.

Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Denpasar I Wayan Wirawan mengharapkan bahwa sistem tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya para mahasiswa dan akademisi yang melakukan penelitian.

“Tentu dengan hak dan kewajiban, para peneliti mendapatkan rekomendasi dari kami, dan hasil penelitian yang bersangkutan kembali dikirimkan sebagai arsip kami,” ucapnya. (ant)

Denpasar-Jepang Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, telah menjalin kerja sama dengan negara Jepang, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui sejumlah universitas negara tersebut.

Pendiri Mataken Gakko, IGK Pujawan saat bertatap muka dengan Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut tentunya semakin erat karena sejumlah universitas di Jepang secara bergantian datang ke Denpasar untuk memberikan kursus bahasa Jepang kepada masyarakat Bali, khususnya warga Denpasar.

Ia mengatakan kali ini yang datang dari Universitas Tottori kembali mengirimkan empat mahasiswa, yakni Tatsuya Fukuda, Satoko Ichihashi, Ayumi Ohashi dan Yuka Tajima untuk mengajar bahasa Jepang di Mataken Gakko di Tohpati, Kota Denpasar.

“Maka dari itu saya ingin

memperkenalkan kepada para mahasiswa tersebut terkait dengan peran Pemerintah Denpasar sangat luar biasa mendukung langkah ini,” ujar Pujawan.

Ia mengatakan, selain mengajar bahasa Jepang, mereka juga mempelajari kebudayaan Bali. Untuk mengetahui kebudayaan Pulau Dewata, mereka juga mengikuti prosesi upacara Hari Suci Nyepi, mulai dari upacara Melasti ke pantai hingga prosesi “malam pengerupukan Nyepi”.

Dengan mengetahui kebudayaan Bali secara mendalam mereka bisa mempublikasikan atau memperkenalkan di daerah asalnya. Sehingga wisatawan dari Jepang banyak yang berkunjung ke Bali khususnya Kota Denpasar.

“Warga Jepang sangat senang dan mengapresiasi masyarakat Bali yang merayakan Hari Suci Nyepi dengan sangat khuyuk,” ucapnya.



Pendiri Mataken Gakko, IGK Pujawan dan mahasiswa dari Universitas Tottori saat bertatap muka dengan Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar. (Foto Humas Pemkot Denpasar)

Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengucapkan terima kasih kepada mereka karena bersedia memberikan kursus bahasa Jepang untuk masyarakat Denpasar khususnya, dan Bali umumnya.

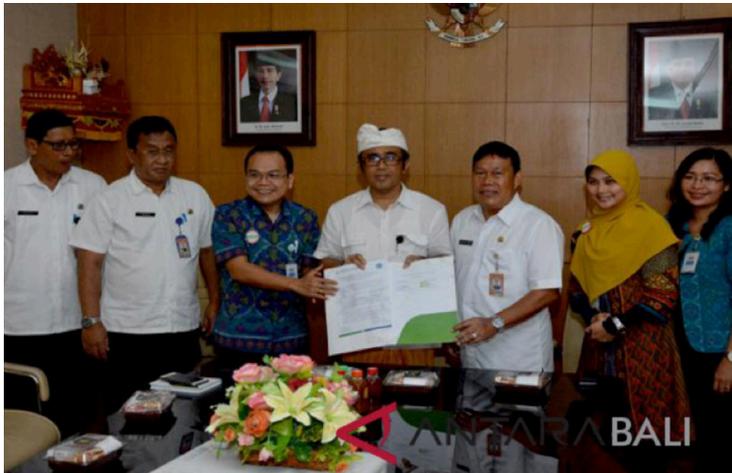
Menurut Rai Iswara, dengan menerima mereka dapat mempererat jalinan kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Jepang yang telah terbentuk

dari dahulu.

Rai Iswara juga merasa dirinya bagaikan saudara dengan negara Jepang karena dari sisi sejarah, pihaknya pun sudah pernah ke Jepang. Bahkan dirinya juga sebagai pengurus di Pasemetonan Denpasar-Fukuoka.

“Maka dari itu saya berharap kerja sama dan hubungan baik ini bisa semakin erat, dan berlanjut ke depannya,” ujarnya. (ant)

Pemkot Denpasar Tambah Kuota Penerima Iuran JKN-KIS



Penandatanganan adendum perjanjian kerja sama antara pemkot melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar. (Foto Humas Pemkot Denpasar)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menambahkan kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (JKN-KIS PBIAPBD) tahun 2018 mencapai 15.000 orang.

Pelaksana Tugas Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Kamis, men-

gatakan pemkot menambahkan kuota jumlah penduduk yang akan didaftarkan ke dalam program JKN-KIS sebanyak 15.000 jiwa, sehingga total 41.480 orang.

Ia mengatakan untuk penambahan kuota tersebut telah dilakukan penandatanganan adendum perjanjian kerja sama antara pemkot melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota

Denpasar dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar yang dilakukan pada Rabu (14/3) di Kantor Wali Kota Denpasar.

Jaya Negara mengatakan dengan penambahan kuota tersebut merupakan sebuah komitmen Pemkot Denpasar bersama BPJS untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kurang mampu. Dengan tujuan warga kurang mampu tidak beban dalam mengurus pembayaran kesehatan, serta akan memberi motivasi dalam menjalankan kehidupan ke depan.

“Jadi konsep `Sewaka Dharma` melayani adalah kewajiban bisa terus diupayakan di berbagai bidang dan diharapkan BPJS terus memberikan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Denpasar khususnya,” ucap Jaya Negara didampingi Sekda Anak Agung Rai Iswara.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Kiki Christmar Marbun mengatakan peran pemerintah memang sangat

diharapkan dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakatnya.

“Untuk itu kami sangat mengapresiasi atas langkah dan komitmen Pemkot Denpasar yang terus menambah jumlah kuota masyarakat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Di harapkan langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi pemda lain,” katanya.

Hingga saat ini jumlah masyarakat terdaftar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang di tanggung oleh Pemkot Denpasar sebanyak 26.375 jiwa dan akan terus bertambah hingga total kuota terpenuhi.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Made Mertajaya menjelaskan bahwa untuk teknis pendaftarannya akan ditetapkan oleh disos, kemudian menyerahkan data identitas penduduk yang telah dinyatakan layak untuk mendapat bantuan kepada pihak BPJS Kesehatan. (ant)

Wali Kota Berpesan Maknai Nyepi dengan Bijaksana

Pelaksana Tugas Wali Kota Denpasar, Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara berpesan umat yang merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1940 dan Saraswati untuk memaknai perayaan hari suci dengan bijaksana dan menjaga lingkungan.

“Mari kita maknai momentum suci ini dengan bijaksana dan selalu menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing. Sehingga `Catur Bratha Penyepian` dan Hari Suci Saraswati pada Sabtu (17/3) dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Jaya Negara di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan dari pemantauan masyarakat Kota Denpasar sudah sangat tertib dan sangat mampu menjaga toleransi umat beragama. “Catur Bratha Penyepian yai-

tu Amati Geni (tidak menyalakan api), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian) dan Amati Lelungan (tidak menghibur diri)”, menjadi acuan warga dalam merayakan Hari Suci Nyepi.

“Selama ini masyarakat sudah memaknai perayaan ini dengan bijaksana bahkan `Catur Brata Penyepian` yang dilaksanakan adalah wujud untuk memperkuat toleransi kebhinnekaan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Peringatan Hari Suci Nyepi yang dilaksanakan setiap tahunnya, menjadi momentum yang begitu istimewa. Diawali dengan “Melasti” sebagai bentuk penyucian diri, dilanjutkan dengan “Malam Pengerupukan” yang biasanya dimeriahkan

dengan pawai “Ogoh-Ogoh” sebagai sarana “nyomia Buta Kala”.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang introspeksi diri untuk meningkatkan `Sradha Bhakti` atau persembahan kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa),” ucapnya.

Terkait dengan stabilitas keamanan dan ketertiban diharapkan aparat desa serta kelurahan termasuk “pecalang” memiliki peran yang sangat penting.

“Kami harapkan petugas keamanan adat di masing-masing desa pakraman berkoordinasi dengan `bendesa adat` setempat mengawasi pelaksanaan `Tapa Bratha Penyepian` agar berjalan lancar dan khidmat,” kata Jaya Negara.



Plt. Walikota Denpasar, I.G.N Jaya Negara beserta jajaran OPD Pemkot Denpasar mengucapkan selamat melaksanakan Hari Suci Nyepi serta Hari Suci Saraswati kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar. (Antaraneews Bali via Humas Pemkot Denpasar)

Pemkab Badung Siap Laksanakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik



Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung, Dewa Made Apramana, di Mangupura, Badung. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/Fikri Yusuf/2018)

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, siap melaksanakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui sosialisasi aplikasi terbaru SPSE versi 4.2 PPK dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemer-

intah (LKPP) RI.

“Kegiatan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung itu digelar untuk menyamakan persepsi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Admin yang sudah secara online terkait aplikasi terbaru Rencana Umum

Pengadaan (RUP) Barang/Jasa,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung, Dewa Made Apramana, di Mangupura, Badung, Senin.

Dewa Made menjelaskan, sosialisasi tersebut juga digelar untuk meningkatkan transparansi yang lebih transparan dari kecepatan pelelangan maupun kecepatan dalam pelaksanaan pengadaan.

“Dengan aplikasi ini kami harapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dewa Made menambahkan, sosialisasi tersebut telah dilaksanakan rutin setiap tahun. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengikuti kemajuan informasi dan teknologi yang berkembang begitu cepat.

“Ini dibuktikan dengan ad-

anya versi SPSE yang pada awal terdapat versi 3.6, kemudian versi 4 dan sekarang versi 4.2,” kata Dewa Made.

Mengenai aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), menurut Dewa Made terdapat kaitan antara pemerintah di daerah dengan LKPP dan dengan adanya sistem yang terkoneksi secara daring/online dapat membuat proses lebih cepat dan transparan.

“Perkembangan ini berkaitan dengan pelelangan secara elektronik, lelang cepat dan e-katalog. Kalau tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangannya jaman, kita akan ditinggal,” katanya.

Kegiatan sosialisasi yang digelar selama empat hari tersebut, diikuti sekitar 200 orang peserta yang terdiri dari para admin, PPK, PPTK, pejabat pengadaan, ULP dan Pokja. (Adv)

Disbud Badung Latih Generasi Muda Menulis Lontar

Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Bali mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya menulis Aksara Bali diatas daun lontar melalui pelatihan penyuratan (menulis) Lontar di Aula SMPN 1 Abiansemal, Badung.

“Kegiatan ini kami harap dapat melestarikan nilai-nilai seni budaya leluhur yang teramat luhur dan sakral khususnya kepada generasi muda,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Kabupaten Badung, Ida Bagus Anom Bhasma, di Mangupura, Badung, Bali, Selasa.

Anom Bhasma mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil kebijakan untuk melestarikan adat, budaya dan agama sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung.

“Apabila kami dapat menyelamatkan budaya berarti kita telah dapat menunjukkan jati diri

dan kepribadian dalam bidang budaya yang merupakan identitas penting bangsa,” ujarnya.

Anom Bhasma menjelaskan, Bali memiliki berbagai warisan budaya yang harus dilanjutkan generasi muda agar warisan budaya seperti etika, filsafat, tutur dan babad yang isinya ada di dalam Lontar, karena itu perlu dilestarikan agar tidak kehilangan jejak-jejak sejarahnya.

“Selain menggelar pelatihan penyuratan Lontar, Pemkab Badung juga melakukan digitalisasi Lontar, dengan memakai komputer sehingga dapat disimpan di `flashdisk`, sehingga dapat menyelamatkan Lontar yang dikhawatirkan akan rusak,” katanya.

Anom Bhasma menambahkan, generasi muda di Badung juga diberikan pelatihan Bahasa Bali dengan metode dwi aksara sehingga mereka yang belum bisa membaca tulisan Bali dapat



Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung IB. Anom Bhasma (kanan) menyematkan tanda peserta pelatihan penyuratan lontar kepada pelajar di Aula SMP N 1 Abiansemal, Badung. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/Fikri Yusuf/2018)

membaca keterangan tulisan latin saat mempelajari Bahasa Bali.

“Sejalan dengan program pelatihan-pelatihan ini, Pemkab Badung juga mencanangkan TK benuansa Hindu, sehingga

pelajar TK, SD, SMP dan SMA terus diajarkan bahasa Bali dan bahasa Bali yang dikhawatirkan akan punah dapat dipertahankan di Kabupaten Badung,” ujarnya. (Adv)

“Badung Command Centre” Jadi Pusat Informasi Masyarakat



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (keempat kanan) meninjau ruangan gedung Command Centre di Puspem Badung. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/Fikri Yusuf/2018)

Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa mengharapkan “Badung Command Centre” yang dibangun di kawasan Pusat Pemerintah Badung, Mangupura, dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat.

“Semoga keberadaan `Badung Command Centre` ini dapat memberikan berbagai informasi data yang tepat dan akurat dengan teknologi informasi kekinian, baik bagi masyarakat maupun pemerintah,” ujar

Suiasa saat Upacara “Pemlepasan” (upacara ritual peresmian) gedung itu, Selasa.

Wabup Badung menjelaskan, pembangunan gedung yang dirancang menjadi pusat teknologi di Kabupaten Badung tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan program “Badung Smart City”.

“Membangun Badung yang kuat dan hebat tentu tidak hanya dengan membangun gedung yang megah, namun yang terpenting sumber daya manusianya juga harus `smart` dan bisa menguasai serta mengerti teknologi itu sendiri,” katanya.

Setelah persembahyangan upacara `Pemlepasan` tersebut, Wabup Ketut Suiasa didampingi pimpinan instansi terkait melakukan kunjungan dan

mengamati fungsi dari ruangan-ruangan gedung “Command Centre” tersebut.

Sementara itu, Kadis Kominfo Badung, Wayan Weda Darmaja menjelaskan, gedung berlantai tiga tersebut untuk lantai satu gedung digunakan ruang administrasi dan “Command Centre”.

Di lantai dua akan digunakan sebagai ruang kepala dinas ruang pertemuan dan Media Centre, sedangkan di lantai tiga gedung tersebut akan digunakan sebagai ruang pusat data dan server.

“Kami harap dengan rampungnya pembangunan gedung “Badung Command Center” ini dapat memudahkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung untuk mendapatkan data dan informasi,” ujar Wayan Weda Darmajaya. (Adv)

Badung Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, melalui Bagian Hukum dan HAM menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Badung tahun 2018 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

“Tujuan kegiatan Bimtek penyusunan produk hukum ini untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan kemampuan bagi kepala sekolah dan perangkat desa di Badung dalam menyusun produk hukum,” ujar Kasubag Peraturan Perundang-undangan Pemkab Badung A.A. Gde Asteya Yudhya di Mangupura, Badung, Rabu.

Ia menjelaskan hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan suatu produk hukum daerah yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta terwujudnya tertib hukum dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang kepala sekolah terdiri

dari 22 orang kepala sekolah SMP dan 48 SD serta 62 orang dari Perangkat Desa,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Pemkab Badung, Ketut Martha yang mewakili Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan produk hukum tersebut.

“Kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai upaya mencegah terjadinya salah tafsir atau pemahaman akan produk hukum yang telah diberlakukan,” ujarnya.

Ketut Martha mengatakan, hal tersebut sekaligus menjadi tuntutan mendasar bagi aparatur pemerintah dalam upaya memahami dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bagaimana menyusun suatu produk hukum daerah yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil.

Ia menambahkan, setiap



Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ketut Martha membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Badung tahun 2018 di Puspem Badung. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/Fikri Yusuf/2018)

produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis formal untuk mendapatkan produk hukum yang efektif dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi.

“Pak Bupati juga berpesan, kedepannya di wilayah Kabupaten Badung juga harus mampu menciptakan atau membentuk produk hukum yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik,” kata Ketut Martha. (adv)

Bali Siap Jadi Tuan Rumah ‘Bollywood Awards’



Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. (Foto Antara Bali/DewaWiguna/2018)

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan Pulau Dewata siap menjadi tuan rumah ajang penghargaan insan film India atau “Bollywood Awards” 2018.

“Kalau bisa digelar di Bali ini

akan menjadi promosi luar biasa,” katanya di Kuta, Kabupaten Badung, Rabu.

Menurut dia, ajang International Indian Film Academy (IIFA) atau yang biasa dikenal dengan “Bollywood Awards” itu menghadirkan sekitar 2.500 artis dan pelaku industri perfil-

man India.

Setiap tahun, ajang itu digelar berpindah-pindah di sejumlah negara dan sebelumnya dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, 13-15 Juli 2017.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya bersama pemerintah daerah setempat tengah mengadakan komunikasi intensif dengan pihak penyelenggara.

Suryawijaya yang juga ketua PHRI Badung itu juga mengharapkan dukungan dari kementerian untuk menyukseskan acara tersebut karena biaya yang disodorkan oleh panitia terbilang tinggi sekitar 80 juta dolar AS.

“Mereka sudah ajukan proposal, biayanya cukup tinggi. Tetapi kami ingin agar kementerian juga bantu dan sponsor tentunya,” katanya.

Pihaknya juga mengharapkan makin banyak maskapai pener-

bangkan membuka akses penerbangan dari Bali-India.

Meski sudah ada satu maskapai yang melayani penerbangan langsung ke India, namun masih melakukan transit di negara lain.

India, lanjut dia, merupakan salah satu pasar wisatawan yang potensial saat ini selain dari China dan Timur Tengah serta pasar lainnya.

Konsul Jenderal India di Denpasar Sunil Babu mengatakan tahun 2017, wisatawan dari negeri itu ke Bali mencapai sekitar 250 ribu orang menduduki posisi ketiga kunjungan wisman terbanyak setelah China dan Australia.

Jumlah itu melonjak signifikan setelah dibukanya bebas visa jika dibandingkan tahun 2015 yang jumlahnya mencapai sekitar 19 ribu orang. (adv)

Bupati Giri Prasta Resmikan Balai Banjar Pacung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, saat penandatanganan prasasti serta meresmikan Balai Banjar Pacung, Desa Adat Blahkiuh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal.

Ketua panitia karya, I Wayan Darma menyampaikan, peresmian dan upacara melaspas ini dilaksanakan bertepatan dengan piodalan di pura melanting dan pura dalem penyarikan Banjar Pacung.

I Wayan Darma, Ketua panitia karya, atas nama krama banjar Pacung, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung yang telah memberikan bantuan pembangunan balai banjar Pacung, yang meliputi bangunan bale banjar, bale kulkul, pura melanting dan pura pengulun banjar dengan biaya sebesar Rp. 2 Miliar.

Bupati Giri Prasta juga menyampaikan apresiasinya, karena telah dapat meresmikan dan menghadiri karya melaspas bale banjar, pura melanting,

pura pengulun banjar, dan bale kulkul Banjar Pacung. Menurutnya ini adalah salah satu konsep yang dilaksanakan oleh Pemkab Badung dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) guna meringankan beban masyarakat terutamanya krama banjar.

“Kami memiliki 554 banjar di Badung, selaku pemerintah kami wajib memfasilitasi dan melakukan pembangunan di banjar itu sendiri,” jelasnya Giri Prasta.

Dalam melaksanakan konsep Tri Hita Karana yang didalamnya mencakup, parhyangan, pawongan dan palemahan. Di bidang parhyangan, Pemkab membantu pembangunan pura khayangan tiga desa adat di Badung.

Pawongan, diberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, upacara/upacara termasuk nyekah bersama dibantu sepenuhnya. Sementara palemahan, bagaimana manusia harus menata lingkungan untuk



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, saat penandatanganan prasasti serta meresmikan Balai Banjar Pacung, Desa Adat Blahkiuh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal (Foto Humas Pemkab Badung)

menjadi sumber perekonomian mereka. “Itulah konsep Tri Hita Karana, yang penting kita komitmen, dengan kebijakan politik anggaran yang harus kita berikan kepada masyarakat sehingga dapat meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Diakhir acara, guna mendukung pelaksanaan karya, Bupati Giri Prasta menyerahkan dana punia sebesar Rp. 20 juta. Acara tersebut juga dihadiri Anggota

DPRD Badung Ida Bagus Made Sunartha, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung I Bagus Alit Sucipta, Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Camat Abiansemal I Gst Ngurah Suryajaya, Bendesa Adat Blahkiuh Ida Bagus Bajra, Perbekel Sangeh I Made Werdiana, Ketua BPD Sangeh Ida Bagus Putu Surya serta seluruh krama banjar adat Pacung. (adv)

Badung Luncurkan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meluncurkan sejumlah inovasi baru dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat setempat.

“Inovasi yang kami luncurkan adalah program ‘Badung Aku Sapa’, mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan, serta mencanangkan Program ‘GISA’ (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan),” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Badung, I Nyoman Soka di Pusat Pemerintahan Badung, Jumat.

Nyoman Soka menjelaskan, program “Badung Aku Sapa” mempunyai paket layanan “3 in 1” meliputi, layanan satu paket akte kelahiran yaitu masyarakat langsung mendapatkan kutipan akte kelahiran, KK dan KIA.

Kedua, paket akte perkawinan yakni akte perkawinan, KK dan perubahan KTP. Sedangkan yang ketiga adalah paket akte kematian yakni akte kematian, perubahan KK

dan santunan sebesar Rp 10 juta.

Selain layanan “3 in 1” tersebut pihaknya juga memberi layanan untuk paket perceraian yaitu berupa akte cerai, perubahan KK dan perubahan KTP.

“Inovasi ini sebenarnya merupakan arahan dan ide dari Pak Wakil Bupati, Ketut Suiasa, mulai tahun 2018, paket ini terus kami uji coba guna memastikan tidak ada hambatan sehingga saat ini program ‘Badung Aku Sapa’ bisa diluncurkan,” ujarnya.

Nyoman Soka mengatakan, bagi masyarakat Badung yang mempunyai keterbatasan fisik, pihaknya juga telah menyiapkan mobil layanan yang dilengkapi dengan sarana prasarana sehingga siap memberikan pelayanan ke tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan.

Selain meluncurkan Badung Aku Sapa, dan pengoperasian mobil layanan keliling Pemkab Badung dalam kesempatan tersebut juga secara resmi mencanangkan Program “GISA”.



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, didampingi Kadisdukcapil Provinsi Bali I Wayan Sudana dan Kadisdukcapil Badung I Nyoman Soka secara resmi meluncurkan “Badung Aku Sapa” dan mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan di Puspem Badung, Kamis (Foto Humas Pemkab Badung)

Program “GISA” tersebut mencakup empat program pokok yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

“Program dan inovasi tersebut kami harap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan

menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan negara yang memiliki daya saing,” kata Nyoman Soka.

Sementara itu, Wakil Bupati Ketut Suiasa menyampaikan, berbagai inovasi tersebut dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat.

“Suksesnya program ini juga harus didukung dengan sinergitas dan gotong-royong dari aparat mulai dari banjar, desa, kecamatan hingga petugas di Disdukcapil,” ujarnya. (adv)

Badung Dukung Pemuda Untuk Lestarikan Tradisi



Bupati Badung I Ketut Suiasa memukul kendang saat membuka Festival Beleganjur Desa Mengwi di Lapangan Umum Mengwi. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/Fikri Yusuf/2018)

Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa, mengaku pihaknya sangat mendukung upaya pemuda Desa Mengwi dalam melestarikan tradisi tradisional Bali melalui Festival Beleganjur (musik perpaduan gamelan Bali) di Lapangan Umum Mengwi, Badung (10/3).

Informasi dari Humas Ba-

badung yang diterima Antara di Mangupura, Minggu, melaporkan kegiatan yang digelar pemuda Desa Adat Mengwi untuk memperingati Nyepi itu merupakan wujud komitmen masyarakat, khususnya pemuda bersama pemerintah untuk melestarikan seni, budaya dan tradisi.

“Saya sangat mengapresiasi

warga Desa Mengwi karena kegiatan Festival Beleganjur ini mengajegkan (melestarikan) budaya, adat, agama, seni dan tradisi sehingga kegiatan ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan kedepannya,” kata Wabup Suiasa sebagaimana dikutip Humas.

Wabup Ketut Suiasa menjelaskan dirinya juga sangat berharap kegiatan festival Beleganjur tersebut juga dapat menjadi suatu wadah kegiatan yang positif bagi generasi muda, khususnya di wilayah Desa Mengwi.

“Saya harap Festival Beleganjur ini dapat meningkatkan kreativitas generasi muda di Desa Adat Mengwi serta mempererat persaudaraan diantara ‘Sekeha Teruna’ (kelompok pemuda) se-Desa Adat Mengwi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Karang Teruna?Wiratama Mandala Desa

Mengwi, I Gede Ketut Mardika, menjelaskan Festival Beleganjur tersebut diikuti sembilan “Sekeha Teruna” dari 11 “Sekeha Teruna” yang ada di Desa Mengwi.

“Festival Beleganjur ini juga kami gelar sebagai rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi. Selain itu, kegiatan ini kami harap dapat melestarikan seni dan budaya terutama di bidang seni Beleganjur, khususnya di wilayah Kabupaten Badung,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Ketut Suiasa juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada panitia Festival Beleganjur.

“Semoga bantuan ini dapat lebih memotivasi pemuda untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berkese-nian,” ujarnya. (adv)

Bupati Badung Apresiasi Persatuan Warga Desa Tuban



Giri Prasta didampingi Suiasa menyerahkan dana bantuan senilai Rp 50 juta melalui Bendesa Adat Tuban, Wayan Mendra (Foto Humas Pemkab. Badung)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengapresiasi persatuan dan kerukunan warga Desa Adat Tuban dalam menyaksikan rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 di wilayah tersebut.

Giri Prasta ketika menghadiri

Pasar Majelangu di Desa Adat Tuban, Minggu (18/3), mengapresiasi toleransi warga setempat di tengah kehidupan masyarakat heterogen yang tetap mampu rukun dan bersatu.

“Wujud toleransi warga Desa Adat Tuban ini sangat pantas

untuk dijadikan `role model`.

“Bukan hanya untuk Bali, melainkan juga nasional,” ucapnya dalam keterangan pers.

Ia menjelaskan Pemkab Badung juga berupaya membuat kebijakan yang adil tanpa membedakan suku, ras dan agama.

“Saya selaku Bupati Badung tentu harus mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal itu berarti semua insan harus sama dapat dan sama rasa,” katanya.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Badung Badung, kata dia, juga dalam rangka mendukung program Presiden Joko Widodo yaitu Indonesia Hebat melalui revolusi mental.

“Revolusi mental tidak dapat dilakukan kalau masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena itu

kebijakan yang kami keluarkan cenderung menasar kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Dalam kegiatan Pasar Majelangu Desa Adat Tuban tersebut Giri Prasta juga menyerahkan dana bantuan senilai Rp50 juta.

Sementara itu Bendesa Adat Tuban I Wayan Mendra menjelaskan berbagai rangkaian perayaan Nyepi Tahun Baru Caka 1940 di Desa Adat Tuban berjalan aman atas dukungan seluruh komponen warga setempat.

“Seluruh kegiatan rangkaian Nyepi dapat terlaksana berkat kolaborasi segenap warga Tuban, tanpa batas perbedaan suku, ras, ataupun agama. Bahkan, di sini juga ada anggota Pecalang beragama Muslim yang ikut berjaga saat Hari Raya Nyepi,” ujarnya. (adv)

Diskes Badung Targetkan 148.644 Orang Imunisasi JE

Kadis Kesehatan Kabupaten Badung, Bali dr I Gede Putra Suteja menargetkan 148.644 orang di daerah itu mendapatkan imunisasi Japanese Encephalitis (JE) atau penyakit radang otak pada tahun 2018.

“148.644 warga Badung yang mendapat imunisasi tersebut rinciannya, 16.400 orang laki-laki dan 72.244 orang perempuan,” ujarnya saat kegiatan kampanye imunisasi JE di SD Negeri 1 Buduk, Kecamatan Mengwi, Badung, Senin.

Gede Putra Suteja menjelaskan, program pelaksanaan kampanye imunisasi JE yang dilakukan pihaknya diawali dengan pemberian imunisasi secara massal, serentak dan tanpa memandang status imunisasi.

“Setelah selesai kampanye imunisasi JE, maka selanjutnya imunisasi akan masuk ke dalam jadwal imunisasi rutin yang diberikan pada anak usia 10 bulan,” ujarnya.

Gede Putra Suteja mengatakan, sasaran dari imunisasi JE ini dibagi dalam beberapa

tahap, meliputi anak usia 9 bulan hingga 6 tahun, usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, dengan jumlah pos untuk kampanye imunisasi JE di Badung sebanyak 1.254 pos.

“Imunisasi merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit JE karena belum ada obat untuk penyakit tersebut,” ujarnya.

Gede Putra Suteja menjelaskan, manusia dapat tertular virus JE jika digigit nyamuk `culex` yang sebelumnya menggigit babi atau beberapa spesies burung di daerah persawahan yang terinfeksi virus JE.

“Penyakit ini dapat menimbulkan kematian dan bila bertahan hidup atau sembuh biasanya diikuti dengan gejala bisa berupa kelumpuhan dan keterbelakangan mental,” katanya.

Sementara itu, Wabup Suiasa yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, pihaknya sedang mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kampanye imunisasi dan



Wabup Badung, Ketut Suiasa (keempat kiri) berbincang saat melakukan monitoring kampanye imunisasi JE di SDN 1 Buduk, Mengwi. (Antarabali via Humas Pemkab Badung/Fikri/wdy/2018)

pengobatan penyakit JE sebagai bentuk komitmen pemerintah di bidang kesehatan.

“Kami terus mengantisipasi seluruh hal yang menyangkut ancaman di bidang kesehatan. Kami mengantisipasi penyebaran virus JE lebih awal karena tidak ingin `kasep tangkis` (lambat mengantisipasi penyakit),” ujarnya.

Wabup Suiasa menambahkan, prioritas pertama

imunisasi JE ini adalah anak usia sekolah karena mereka memiliki kecenderungan paling rentan terjangkit virus mematikan itu.

“Tahap satu kami lakukan di anak sekolah dulu, tahap kedua baru diperluas jangkauannya ke anak non-sekolah. Kami menargetkan seluruh masyarakat Badung harus terlayani,” ujar Wabup Suiasa. (Ana/Fikri)



MELALUI CATUR BRATA PENYEPIAN, KITA TINGKATKAN SOLIDITAS SEBAGAI PEREKAT KEBERAGAMAN DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI, UNTUK TERWUJUDNYA MASYARAKAT BALI YANG MANDARA (MAJU, AMAN, DAMAI, SEJAHTERA)

 This section features the Coca-Cola Amatil Indonesia logo at the top left. Below it, the text reads:

Manajemen Coca-Cola Amatil Indonesia Mengucapkan:

SELAMAT

HARI RAYA NYEPI

Tahun Baru Saka 1940

 This section features the logo of the DPRD Balangan at the top right. The text reads:

Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

Mengucapkan Selamat

hari raya nyepi

Tahun Baru Saka 1940 17 Maret 2018

Semoga Spirit Catur Brata Penyepian selalu mendorong kita melaksanakan dharma agama dan dharma negara, untuk tetap menjaga hubungan harmonis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat

 At the bottom, there are three circular portraits of officials.